

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa terhadap implementasi kebijakan digitalisasi arsip pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5 yang didasarkan kepada teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III dengan mempertimbangkan empat faktor di dalam mengimplementasikan kebijakan publik maka diperoleh kesimpulan bahwa:

##### 1. Komunikasi

Pengimplementasian kebijakan digitalisasi arsip pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5 adalah sebagai bentuk pemenuhan kewajiban atas berlakunya Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan ini timbul hambatan berupa masih ditemukan beberapa pekerja yang belum memahami dengan jelas terkait dengan pengoprasian sistem digitalisasi arsip. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kemampuan pekerja dalam menangkap dan memahami informasi yang disampaikan.

##### 2. Sumberdaya

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5 dalam upaya mengimplementasikan kebijakan digitalisasi arsip masih mengalami kekurangan sumberdaya. Kurangnya jumlah staff ahli yang memiliki

sertifikasi arsiparis, sehingga PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5 mengirimkan lebih banyak pekerja yang kompeten untuk melaksanakan pelatihan pengelolaan arsip yang bersertifikasi arsiparis. Selain itu fasilitas pada Gedung Arsip Daerah Operasi 5 masih belum memenuhi standar seperti AC untuk menjaga suhu ruang kelembaban udara, springkel untuk pemadam api otomatis, rak penyimpanan berbahan besi, serta penambahan CCTV di beberapa titik untuk meningkatkan keamanan. Meskipun fasilitas yang ada sekarang ini belum sepenuhnya memenuhi standar PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5 harus tetap memperhatikan kondisinya dengan melakukan perawatan secara berkala sehingga dalam pengimplementasian digitalisasi arsip dapat berjalan seperti semestinya.

### 3. Disposisi (Sikap)

Sikap implementor kebijakan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas implementasi kebijakan. Karena sikap dari implementor kebijakan akan mempengaruhi kinerja kebijakan karena jika implementor kebijakan memiliki kemauan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan dengan baik, maka keberhasilan dalam implementasi kebijakan akan semakin besar. Dalam implementasi kebijakan digitalisasi arsip pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5, kemauan dan komitmen para pekerja dalam melaksanakan implementasi kebijakan digitalisasi arsip sudah cukup

baik. Akan tetapi hambatan yang timbul justru terdapat seorang oknum pekerja yang dengan sengaja melanggar aturan institusi yang dapat menyebabkan terhambatnya proses implementasi kebijakan digitalisasi arsip dan juga dapat merugikan perusahaan. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5 sebagai institusi pemerintah harus menindak tegas oknum tersebut agar menimbulkan efek jera dan kedepannya kejadian serupa tidak terulang kembali

#### 4. Struktur Birokrasi

Setiap unit pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5 telah melakukan koordinasi dengan baik dengan memahami jobdesk dan tanggung jawab masing-masing. Dengan memperhatikan *Standart Operating Procedures* (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan digitalisasi arsip. Proses dan alur pengarsipan digital dilaksanakan tanpa prosedur yang berbelit-belit serta disesuaikan dengan sumber-sumber yang ada agar terjadi keseragaman tindakan dari para pelaksana kebijakan. Kendala yang ditemukan pada faktor ini adalah penyesuaian diri pekerja dalam mengelola arsip digital masih terbatas dalam menyesuaikan dirinya dengan tuntutan-tuntutan perubahan. Terkait kendala tersebut diperlukan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan cara mempelajari sistem digitalisasi arsip itu sendiri.

## 5.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, berikut didapatkan beberapa implikasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari temuan-temuan yang didapatkan dari hasil penelitian dalam proses komunikasi dalam implementasi kebijakan digitalisasi arsip pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5 dari segi informasi yang diberikan oleh kantor pusat kepada implementor di Daop 5 Purwokerto sudah dapat dipahami dengan baik. Implementor di Daop 5 Purwokerto sudah memahami standar prosedur dalam mengoprasikan sistem digitalisasi arsip. Hanya saja masih terdapat beberapa pekerja yang belum memahami dengan jelas terkait dengan pengoprasian sistem digitalisasi arsip. Hambatan tersebut dapat disebabkan oleh kemampuan pekerja dalam menangkap dan memahami informasi yang disampaikan. Hal tersebut berimplikasi kepada kurangnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan karena usia dan perbedaan generasi yang cukup nampak. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi ataupun pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan digitalisasi arsip. Sehingga solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi hambatan pada faktor komunikasi adalah dengan melakukan evaluasi pada setiap pekerja serta dilaksanakannya diklat atau pelatihan bagi setiap petugas pelaksana dokumen.

2. Dari temuan penelitian, sumberdaya dalam mendukung suksesnya implementasi kebijakan digitalisasi arsip pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5 didapati masih mengalami kekurangan sumber daya manusia sebagai seorang staff ahli, kemudian dari segi fasilitas pada Gedung Arsip Daop 5 Purwokerto juga masih belum memenuhi standar yang ada. hal tersebut akan berimplikasi pada kurang efektifnya pengelolaan arsip digital karena hanya memiliki satu staff ahli, kemudian fasilitas yang belum memenuhi standar akan berimplikasi pada tersendatnya proses pengelolaan arsip digital, timbul kejadian yang tidak diinginkan seperti kebakaran, rusaknya box arsip, serta akan timbul masalah keamanan. Perlu adanya peninjauan oleh kantor pusat terkait dengan lokasi gedung yang dirasa cukup jauh sehingga masih terkendala dari segi keamanan. Lalu peninjauan dengan tujuan pemenuhan fasilitas dasar diperlukan oleh gedung arsip agar sesuai dengan standar.
3. Berdasarkan hasil temuan penelitian terkait disposisi atau sikap implementor dalam implementasi kebijakan digitalisasi arsip pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5, ditemukan oknum pekerja yang malakukan tindakan indisipliner. Hal tersebut berimplikasi pada terhambatnya proses implementasi program digitalisasi arsip serta dapat menimbulkan kerugian pada institusi. Intitusi harus berani mengambil tindakan tegas kepada pekerja yang dengan sadar melanggar peraturan institusi, melakukan tindakan

indisipliner, serta merugikan institusi. Agar menimbulkan efek jera serta dengan harapan kedepanya tidak terulang kembali.

4. Berdasarkan hasil temuan penelitian terkait struktur birokrasi dilihat dari fragmentasi dan *Standard Operating Procedures* (SOP) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5 yang sudah dilaksanakan dengan baik hanya perlu ditingkatkan kembali, tetapi kendala yang ditemukan pada faktor ini adalah penyesuaian diri pekerja dalam mengelola arsip digital masih terbatas dalam menyesuaikan dirinya dengan tuntutan-tuntutan perubahan. Hal tersebut dapat berimplikasi pada kurang efektif dan efisienya pekerjaan yang dilakukan dalam proses implementasi digitalisasi arsip. Sehingga para pekerja diharapkan dapat terus berkembang dengan mempelajari secara seksama sistem yang diterapkan, serta selalu mengikuti komando dari *leader* dalam melaksanakan pekerjaanya.